

Analisis Varians Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Mareca Anggriyani¹, Dewi Sartika²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Bina Dharma, Palembang, Indonesia

*Korespondensi: mareca.anggriyani@student.binadarma.ac.id

Received: 25-06-2026

Revised: 07-08-2026

Accepted: 14-09-2026

Abstract

This study aims to analyze the variance between the budget and actual regional expenditure at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palembang City during the 2021–2025 fiscal years. The study employs a quantitative descriptive approach utilizing secondary data derived from audited Budget Realization Reports (LRA). The results indicate that actual expenditure throughout the 2021–2025 period consistently fell below the established budget, resulting in entirely favorable variances. The expenditure realization rate ranged from 82.48% in 2021 to 93.04% in 2024, with a five-year average realization of 89.40%. Based on efficiency criteria, expenditures from 2021 to 2023 fell into the "efficient" category, while those from 2024 to 2025 were classified as "highly efficient." The largest variance occurred in 2021 a year still impacted by the COVID-19 pandemic whereas the smallest variance occurred in 2024. These conditions reflect improvements in budget planning and execution. Factors contributing to these variances include planning inaccuracies, delays in procurement processes, limited human resources, and changes in central government policies. Consequently, BPKAD Palembang City needs to enhance the quality of data-driven planning, accelerate procurement processes, and optimally utilize the Regional Government Information System (SIPD) to support real-time expenditure monitoring and control.

Keywords: Budget Variance, Regional Expenditure Realization, Spending Efficiency, BPKAD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang selama Tahun Anggaran 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja selama periode 2021–2025 selalu berada di bawah anggaran yang ditetapkan, sehingga seluruh varians tergolong *favorable*. Persentase realisasi belanja berada pada kisaran 82,48% pada tahun 2021 hingga 93,04% pada tahun 2024, dengan rata-rata realisasi sebesar 89,40% selama lima tahun. Berdasarkan kriteria efisiensi, belanja tahun 2021–2023 berada dalam kategori efisien, sedangkan tahun 2024–2025 termasuk kategori sangat efisien. Varians terbesar terjadi pada tahun 2021 yang masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19, sementara varians terkecil terjadi pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya varians antara lain ketidaktepatan perencanaan, keterlambatan proses pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta perubahan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, BPKAD Kota Palembang perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, mempercepat proses pengadaan, dan memanfaatkan SIPD secara optimal untuk mendukung pemantauan dan pengendalian belanja secara *real-time*.

Kata Kunci: Varians Anggaran, Realisasi Belanja Daerah, Efisiensi Belanja, BPKAD

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan publik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Tanggung jawab tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk menyusun dan mengelola anggaran berbasis kinerja serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Ulya & Astuti, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. APBD digunakan sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah anggaran yang telah direncanakan tidak selalu sama dengan realisasi yang terjadi. Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut disebut sebagai varians anggaran (*budget variance*). Varians dikategorikan *favorable* ketika realisasi pengeluaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, varians disebut *unfavorable* apabila realisasi pengeluaran lebih tinggi daripada anggaran yang direncanakan (Liyani *et al.*, 2021).

Analisis varians anggaran menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik. Dengan melakukan analisis ini, pimpinan dapat melihat apakah terdapat perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Jika terdapat penyimpangan, analisis varians dapat membantu mengetahui penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Selain itu, analisis varians juga dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara lebih terbuka kepada masyarakat (Kasi, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja daerah. Liyani *et al.*, (2021) misalnya, menganalisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kota Magelang selama 2018–2021 dan menunjukkan bahwa secara umum varians yang terjadi berada dalam kategori *favorable*. Penelitian Kasi, (2024) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya varians. Sementara itu, Febriana & Narastri, (2023) yang mengevaluasi laporan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Surabaya menemukan bahwa penyerapan anggaran pada beberapa jenis belanja masih belum berjalan secara optimal.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut sebagian besar masih menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat dan belum secara khusus menghubungkan hasil analisis varians dengan tingkat efisiensi belanja secara

berjenjang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan periode pengamatan selama lima tahun, yaitu 2021–2025. Periode tersebut mencakup masa pandemi COVID-19 hingga tahap pemulihan setelah pandemi. Selain menganalisis varians anggaran, penelitian ini juga menggabungkan persentase realisasi, tingkat efisiensi berdasarkan kriteria Mahmudi, (2016) tren pertumbuhan belanja, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya varians. Seluruh analisis tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengambil objek penelitian pada BPKAD Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Instansi ini bertanggung jawab terhadap berbagai tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan tugas tersebut, BPKAD memiliki posisi yang strategis dalam memastikan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Putr *et al.*, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena BPKAD Kota Palembang mengelola anggaran belanja daerah dengan nilai rata-rata lebih dari Rp4,7 triliun setiap tahun. Besarnya anggaran tersebut membuat setiap perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja perlu mendapat perhatian, karena penyimpangan yang relatif kecil sekalipun dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik. Selain itu, periode 2021–2025 merupakan periode yang cukup penting karena mencakup masa pemulihan setelah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, gambaran mengenai pola varians dan tingkat efisiensi belanja selama periode tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini juga semakin relevan karena tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD terus meningkat. Di sisi lain, BPKAD perlu melihat sejauh mana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat membantu proses perencanaan dan pengendalian anggaran secara lebih cepat dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang; (2) menganalisis besarnya varians antara anggaran dan realisasi belanja daerah; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya varians anggaran belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang selama Tahun Anggaran 2021–2025.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Daerah dan APBD

Anggaran dapat dipahami sebagai rencana keuangan yang disusun secara berkala berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana tersebut dinyatakan dalam bentuk angka untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar dalam

mengatur penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam pemerintahan, anggaran memiliki peran penting karena digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengendalikan berbagai kegiatan pemerintah (Perangin-Angin *et al.*, 2023).

Salah satu bentuk anggaran dalam pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Halim, 2016). Secara umum, APBD terdiri atas tiga bagian utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan bersih selama satu tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, realisasi belanja daerah menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD benar-benar digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Tingkat realisasi tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Halim, 2016).

Analisis Varians Anggaran

Analisis varians (*variance analysis*) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat dan mengevaluasi perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi selama suatu periode. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik, analisis ini dapat membantu pemerintah daerah menilai apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana. Mahmudi, (2016) menjelaskan bahwa analisis varians dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, mengetahui sumber terjadinya penyimpangan, menjadi bahan dalam menentukan langkah perbaikan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Suatu varians dikatakan *favorable* apabila realisasi belanja lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, varians disebut *unfavorable* apabila jumlah realisasi belanja lebih besar daripada anggaran yang direncanakan.

Formula perhitungan yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Varians Belanja} &= \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja} \\ \text{Persentase Realisasi} &= (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\% \\ \text{Efisiensi Belanja Daerah} \end{aligned}$$

Penilaian efisiensi belanja daerah mengacu pada kriteria yang diadaptasi dari Mahmudi, (2016) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

No.	Persentase Realisasi	Kategori
1	Di atas 100%	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Sangat Efisien
3	80% – 89%	Efisien
4	70% – 79%	Cukup Efisien
5	Di bawah 70%	Kurang Efisien

Sumber: Mahmudi, (2016)

Faktor Penyebab Varians Anggaran

Maisarah, (2017) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya varians anggaran dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari dalam organisasi, seperti perencanaan anggaran yang kurang tepat, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang belum optimal, serta adanya perubahan prioritas program dan kegiatan. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi di luar organisasi yang sulit dikendalikan secara langsung. Faktor tersebut antara lain perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat, kondisi perekonomian daerah dan nasional, bencana alam, keterlambatan pencairan dana transfer, serta perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi proses pelelangan dan pelaksanaan pengadaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2019) penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu kondisi secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh, termasuk data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Palembang Tahun Anggaran 2021–2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain LRA, penelitian juga menggunakan dokumen APBD, APBD Perubahan, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah dan mencatat informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen resmi tersebut.

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, analisis varians belanja daerah digunakan untuk mengetahui selisih antara anggaran dan realisasi belanja

dengan mengacu pada Mahmudi, (2016). Kedua, analisis rasio efisiensi belanja digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pengeluaran berdasarkan kriteria (Mahmudi, 2016). Ketiga, analisis tren dan pertumbuhan belanja dilakukan untuk melihat perkembangan belanja selama periode 2021–2025 (Halim, 2016). Keempat, analisis komposisi belanja digunakan untuk mengetahui proporsi masing-masing jenis belanja berdasarkan klasifikasi Halim, (2016) Kelima, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya varians dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil dokumentasi dan pengamatan selama kegiatan magang, dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Pelaksanaan anggaran belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang dilakukan dengan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses pelaksanaan anggaran mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, proses pencairan dana dilakukan melalui tahapan SPP, SPM, hingga SP2D yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Palembang selama periode 2021–2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2021–2025

Tahun	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Varians (Rp Miliar)	% Realisasi	Selisih dari 100%	Keterangan
2021	4.300,94	3.547,20	(753,74)	82,47%	17,53%	Favorable
2022	4.479,96	4.009,81	(470,15)	89,51%	10,49%	Favorable
2023	4.540,52	4.077,73	(462,79)	89,81%	10,19%	Favorable
2024	4.960,60	4.615,25	(345,35)	93,04%	6,96%	Favorable
2025	5.351,32	4.878,96	(472,36)	91,17%	8,83%	Favorable
Rata-rata	4.726,67	4.225,79	(500,88)	89,40%	10,60%	Favorable

Sumber: LRA Audited BPKAD Kota Palembang 2021–2025, (2026)

Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kota Palembang menunjukkan kondisi varians belanja yang secara konsisten berada dalam kategori favorable. Hal ini terlihat dari realisasi belanja yang setiap tahunnya masih berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi belanja selama lima tahun mencapai 89,40% dari total anggaran. Tingkat penyerapan anggaran paling tinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar 93,04%. Sementara itu, realisasi terendah tercatat pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 82,47%. Rendahnya penyerapan pada

tahun tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

Analisis Varians Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Perhitungan varians anggaran belanja daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai varians diperoleh dari selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Jika hasil perhitungan menunjukkan nilai negatif, yang berarti realisasi belanja lebih rendah dibandingkan anggaran, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai *Favorable Variance*. Sebaliknya, apabila nilai varians positif karena realisasi belanja melebihi anggaran, maka termasuk *Unfavorable Variance*. Hasil perhitungan varians untuk setiap jenis belanja selama periode 2021–2025 selanjutnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Varians Anggaran Belanja per Jenis Belanja BPKAD Kota Palembang 2021–2025

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2021	Belanja Operasi	3.002.438.394.711,80	2.733.265.939.145,75	91,03%
	Belanja Modal	1.277.109.123.963,64	798.823.605.175,99	62,55%
	Belanja Tidak Terduga	21.391.848.580,00	15.111.208.196,00	70,64%
2022	Belanja Operasi	3.179.093.305.909,00	2.901.390.215.373,04	91,26%
	Belanja Modal	1.235.075.438.427,00	1.107.225.598.946,65	89,65%
	Belanja Tidak Terduga	65.789.739.600,00	1.192.338.036,00	1,81%
2023	Belanja Operasi	3.325.203.430.900,00	2.966.042.012.568,05	89,20%
	Belanja Modal	1.213.452.864.753,00	1.111.611.852.949,77	91,61%
	Belanja Tidak Terduga	1.862.140.904,00	78.726.993,00	4,23%
2024	Belanja Operasi	3.582.171.064.406,82	3.364.349.169.273,73	93,92%
	Belanja Modal	1.375.725.814.889,18	1.250.894.551.351,00	90,93%
	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000,00	4.771.650,00	0,18%
2025	Belanja Operasi	3.962.515.424.728,89	3.610.343.396.735,15	91,11%
	Belanja Modal	1.381.816.707.846,82	1.268.017.552.871,68	91,76%

	Belanja Tidak Terduga	6.992.410.274,00	599.400.000,00	8,57%
--	-----------------------	------------------	----------------	-------

Sumber: LRA Auditeid BPKAD Kota Palembang 2021–2025, (2026)

Hasil analisis varians berdasarkan jenis belanja menunjukkan adanya pola yang berbeda pada setiap komponen. Belanja Operasi cenderung memiliki kondisi yang relatif stabil, dengan varians berada pada kisaran 6–11% dari anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Belanja Operasi sudah cukup baik, terutama karena sebagian besar alokasinya digunakan untuk belanja pegawai yang memiliki dasar perhitungan dan kebutuhan yang relatif jelas.

Berbeda dengan Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami perubahan yang lebih besar dari tahun ke tahun. Varians tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 37,45%, yang tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan pengadaan. Setelah itu, kondisi Belanja Modal secara bertahap menunjukkan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga memiliki varians yang paling tinggi, bahkan mencapai 98,19% pada tahun 2022. Besarnya varians tersebut mengindikasikan bahwa penetapan anggaran untuk komponen ini belum sepenuhnya didukung oleh perhitungan kebutuhan yang komprehensif.

Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Analisis efisiensi belanja daerah dilakukan dengan melihat tingkat persentase realisasi belanja, kemudian membandingkannya dengan kriteria efisiensi yang (Mahmudi, 2016). Melalui analisis ini dapat diketahui sejauh mana anggaran belanja daerah telah digunakan secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Hasil perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang selama periode penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Belanja Daerah BPKAD Kota Palembang Tahun Anggaran 2021–2025

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi	Kategori
2021	4.300.939.367.255,44	3.547.200.752.517,74	82,47%	Efisien
2022	4.479.958.483.936,00	4.009.808.152.355,69	89,51%	Efisien
2023	4.540.518.436.557,00	4.077.732.592.510,82	89,81%	Efisien
2024	4.960.596.879.296,00	4.615.248.492.274,72	93,04%	Sangat Efisien
2025	5.351.324.542.849,71	4.878.960.349.606,83	91,17%	Sangat Efisien

Sumber: LRA Audited BPKAD Kota Palembang 2021–2025, (2026)

Tingkat efisiensi belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang menunjukkan perkembangan yang semakin baik selama periode penelitian. Pada Tahun Anggaran 2021–2023, persentase realisasi belanja berada pada kisaran 82,47%–89,81% dan termasuk dalam kategori Efisien. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025, tingkat

realisasi meningkat masing-masing menjadi 93,04% dan 91,17%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Efisien. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan temuan Liyani *et al.*, (2021) pada Pemerintah Kota Magelang yang menunjukkan bahwa varians belanja daerah secara umum berada dalam kondisi favorable selama periode penelitian. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Febriana & Narastri, (2023) pada BPKAD Kota Surabaya yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada umumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa jenis belanja yang tingkat penyerapannya belum mencapai kondisi optimal.

Faktor Penyebab Varians Anggaran

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi selama kegiatan magang, penyebab terjadinya varians anggaran belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi: (1) kelemahan dalam perencanaan anggaran, yang terlihat dari rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga hampir setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan anggaran belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif serta data historis (Maisarah, 2017); (2) keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, terutama pada awal tahun anggaran karena proses pengesahan DPA yang belum selesai; (3) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan teknis; (4) penerapan pengendalian internal yang cukup ketat. Meskipun pengendalian tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas, dalam kondisi tertentu prosesnya dapat membuat pembayaran menjadi lebih lambat; dan (5) perubahan prioritas program akibat kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran yang dilakukan pada pertengahan tahun.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup: (1) dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pelaksanaan hampir seluruh komponen belanja pada Tahun Anggaran 2021, terutama Belanja Modal yang hanya terealisasi sebesar 62,55%; (2) adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang membutuhkan penyesuaian terhadap sistem dan prosedur penganggaran; (3) keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Belanja Modal; (4) kondisi cuaca dan bencana alam yang dapat menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur; serta (5) perubahan harga material dan jasa konstruksi yang dapat memengaruhi proses pengadaan, termasuk menyebabkan kegagalan lelang.

Temuan tersebut sejalan dengan kerangka teoritis Maisarah, (2017); Cahyo, (2022) yang menjelaskan bahwa varians anggaran belanja daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, pandemi COVID-19 menjadi faktor eksternal yang

paling kuat pengaruhnya terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun 2021. Sementara dari sisi internal, persoalan perencanaan anggaran menjadi faktor yang cukup dominan, khususnya dalam penetapan alokasi Belanja Tidak Terduga yang belum sepenuhnya didukung oleh analisis kebutuhan yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja daerah pada BPKAD Kota Palembang selama Tahun Anggaran 2021–2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi belanja setiap tahun masih berada di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh tahun penelitian menunjukkan varians yang bersifat favorable dan tidak ditemukan adanya kondisi overspending.

Varians terbesar terjadi pada Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp753,74 miliar atau 17,52%. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, varians terkecil terjadi pada Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp345,35 miliar atau 6,96%. Selama periode lima tahun tersebut, rata-rata realisasi belanja mencapai 89,40%. Angka ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah tergolong baik, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Dilihat dari tingkat efisiensi berdasarkan kriteria Mahmudi, (2016) kinerja belanja daerah BPKAD Kota Palembang pada Tahun Anggaran 2021–2023 berada dalam kategori Efisien, dengan tingkat realisasi 80–89%. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025, kinerja belanja meningkat menjadi kategori Sangat Efisien, dengan tingkat realisasi 90–100%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran.

Varians anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan perencanaan anggaran, keterlambatan proses pengadaan, keterbatasan kapasitas SDM, penerapan pengendalian internal yang cukup ketat, serta perubahan prioritas program. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dampak pandemi COVID-19, perubahan regulasi, keterlambatan pencairan DAK, kondisi cuaca dan bencana alam, serta perubahan harga di pasar.

Berdasarkan temuan tersebut, BPKAD Kota Palembang perlu memperkuat proses penganggaran yang berbasis data dan kinerja, terutama dalam menetapkan alokasi Belanja Tidak Terduga. Proses persiapan pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian. Pemanfaatan SIPD juga perlu dioptimalkan untuk memantau realisasi belanja secara lebih cepat dan akurat. Evaluasi anggaran secara berkala, misalnya setiap

triwulan, dapat dilakukan untuk mendeteksi lebih awal kegiatan yang berpotensi menghasilkan sisa anggaran yang cukup besar.

Untuk penelitian selanjutnya, cakupan penelitian dapat diperluas dengan melibatkan seluruh SKPD agar gambaran mengenai kinerja belanja daerah menjadi lebih menyeluruh. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* serta mengembangkan model prediksi varians anggaran sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan kondisi yang terjadi, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai potensi varians pada periode mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo, P. N. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018–2022. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 214–223.
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfei.v12i4.74800>
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis laporan realisasi anggaran (LRA) untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*.
- Fitriana, H., & Maulina, I. (2026). Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif akuntansi sektor publik: Studi literatur. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 73–90.
- Gollah, S. N., Paranoan, S., Yamin, N. Y., & Masruddin, M. (2025). Evaluation of regional revenue and expenditure budgets in the Palu City Government. *Journal of Applied Accounting*, 4(1). <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1223>
- Halim, A. (2016). *Akuntansi keuangan daerah (Edisi keempat)*. Salemba Empat.
- Hanifa, R., & Amalia, V. (2023). Analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 6(1). <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i1.258>
- Kasi, A. M. K. (2024). Analisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(4), 2015–2024.
- Labana, J. K., Aftitah, F. N., Hasanah, K., & Hadi, N. L. F. M. (2024). Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 di DKI Jakarta. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 44–50. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.513>
- Liyani, Y. A., Suharto, V. T. L. D. P., & Bharata, R. W. (2021). Analisis varian dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018–2021. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 3(3), 520–528.

- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Maisarah, & B. (2017). Analisis varians anggaran dan realisasi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Marlina, C., & Akbar, G. G. (2023). Analisis kinerja APBD provinsi di Indonesia: Sebuah studi mengenai rasio keuangan, korelasi metrik dan klasterisasi kinerja. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 615–636.
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019–2022. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3).
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Putr, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekobistek*, 12, 1–3. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- Setyaningrum, I., & Sukma Nirwana, N. Q. (2024). Efficiency challenges amid budget success in Indonesia. *Academia Open*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.21070/acopen.9.2024.8173>
- Sinambela, E., & Pohan, K. R. A. (2016). Analisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi*, 16(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2018). Analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 63–79.